

## Kajian pendidikan kewarganegaraan abad ke-21 untuk membentuk kecerdasan kewargaan yang berkeadaban publik

Rianda Usmi, Anggriani Puspitaningrum

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Sejarah Artikel:</b> Diterima: 20/12/2021 Disetujui: 30/12/2021</p> <p><b>Kata kunci:</b> Pendidikan Kewarganegaraan; Kecerdasan Kewargaan; Keadaban Kewargaan</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Civic Education; Civic Intelligence; Civility</i></p>	<p>Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan kemampuan dasar sebagai bagian dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan beradab. Salah satu hal yang harus dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan adalah kecerdasan kewarganegaraan (<i>civic intelligence</i>). Kecerdasan kewargaan menjadi penting untuk dikembangkan pada generasi muda agar memiliki keadaban publik. Penelitian ini bertujuan mengkaji kajian filosofis dan konseptual Pendidikan Kewarganegaraan di abad ke-21 untuk membentuk kecerdasan kewargaan yang berkeadaban publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur/keustakaan. Sumber data penelitian diperoleh dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan studi pendidikan kewarganegaraan, kecerdasan kewargaan, dan keadaban kewargaan. Prosedur meta analisis dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data pustaka, membuat catatan, dan mereview sumber data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan mengumpulkan dan menyusun suatu data yang kemudian dianalisis. Hasil yang diperoleh dalam studi ini menunjukkan bahwa arah filosofis, tujuan, dan kultur Pendidikan Kewarganegaraan abad ke-21 harus sejalan atau diorientasikan untuk menumbuh-kembangkan kecerdasan kewarganegaraan (<i>civic intelligence</i>) melalui koridor "value-based education" demi terciptanya generasi muda yang cerdas, berkualitas, unggul dan berdaya saing, serta berkarakter (berkeadaban publik). Terdapat tujuh kecakapan yang harus dibangun dalam menumbuhkembangkan kecerdasan kewarganegaraan, yaitu 1) <i>civic knowledge</i>; 2) <i>civic skill</i>; 3) <i>civic disposition</i>; 4) <i>civic confidence</i>; 5) <i>civic commitment</i>; 6) <i>civic competence</i>; dan 7) <i>civic culture</i>. Penelitian ini memberikan landasan konseptual peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan kecerdasan publik</p>
	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>Civic education has a strategic role to equip the young generation with basic knowledge and skills as part of preparing smart, responsible and civilized citizens. One of the things that must be developed in civic education is civic intelligence. Citizenship intelligence is important to be developed in the younger generation so that they have public civility. This study aims to examine the philosophical and conceptual studies of Citizenship Education in the 21st century to form public civilized civic intelligence. This research uses a qualitative descriptive approach with a literature study method. Sources of research data were obtained from books and journals related to the study of civic education, civic intelligence, and civic civility. The meta-analysis procedure in this study is to collect library data, make notes, and review data sources. Data analysis used descriptive analysis by collecting and compiling data which was then analyzed. The results obtained in this study indicate that the philosophical direction, function, purpose, and culture of 21st century Citizenship Education must be in line or oriented to developing civic intelligence through the corridor of "value-based education" for the creation of a smart young generation, quality, superior and competitive, as well as character (public civility). There are seven skills that must be developed in developing citizenship intelligence, namely 1) civic knowledge; 2) civic skills; 3) civic disposition; 4) civic confidence; 5) civic commitment; 6) civic competence; and 7) civic culture. This research provides a foundation that underlies the role of civic education in the formation of public intelligence.</i></p>

### Pendahuluan

Abad ke-21 identik dengan abad globalisasi yang banyak membawa perubahan dalam segala lini kehidupan. Mardhiyah, dkk (2021) menyampaikan pandangannya bahwa keberadaan abad ke-21

ditandai dengan era Revolusi Industri 4.0 yang menjadikan abad ke-21 sebagai era keterbukaan atau globalisasi. Secara tidak langsung, era globalisasi di abad ke-21 telah menjadi kenyataan di mana semua orang menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang diakibatkannya. Salah satu peluang yang muncul di abad ke-21 adalah masyarakat mengutamakan pengetahuan. Hal tersebut didukung oleh Soh, Arsyad & Osman (2010) yang menyatakan bahwa abad ke-21 merupakan sebuah abad yang ditandai dengan terjadinya transformasi besar-besaran dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan berlanjut ke masyarakat berpengetahuan.

Abad ke-21 akan memberikan peluang jika dimanfaatkan dengan baik, tetapi juga dapat menjadi tantangan jika tidak diantisipasi secara baik pula. Salah satu contoh tantangan pada abad ke-21 adalah adanya perubahan yang sangat cepat dalam bidang teknologi informasi khususnya pada media sosial. Belakangan media sosial ini telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong (Redhana, 2019). Selain dalam media sosial, perubahan yang sangat cepat pada ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya juga membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan (2010) menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi manusia pada abad ke-21 semakin kompleks mulai dari kelangsungan hidup sampai ke pendidikan.

Tantangan terbesar di abad ke-21 khususnya pada bidang pendidikan adalah pembelajaran. Pembelajaran pada abad ini harus dapat mempersiapkan generasi muda yang mampu menyongsong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan mempersiapkan generasi muda yang mampu menyongsong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terdapat pula salah satu hal yang mendesak untuk diselesaikan yang berkaitan dengan *civic intelligence* generasi muda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masrukhi (2018) menunjukkan betapa profil kecerdasan kewargaan pada anak-anak sekolah masih rendah, yang mana dari tujuh aspek kecerdasan kewarganegaraan hampir semuanya rendah kecuali aspek *civic knowledge*. *Civic Intelligence* merupakan kemampuan seseorang untuk memainkan peran dirinya secara proaktif sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan berbasiskan identitas normatif bangsa.

Dengan berbagai tantangan yang muncul pada abad ke-21, pendidikan mau tidak mau harus terlibat didalamnya dan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang signifikan dan sekaligus dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Dapat dikatakan bahwa, pendidikan memiliki peran penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul pada abad ke-21. Pada abad ke 21, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup (*life skills*). Hal tersebut didukung oleh pendapat Maghfiroh (2017) yang menyatakan bahwa melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan kecerdasan, ketrampilan, mengembangkan potensi diri, dan dapat membentuk pribadi yang bertanggungjawab, cerdas dan kreatif.

Melalui pelaksanaan pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kecerdasannya. Pelaksanaan pendidikan dapat dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah. Guru memiliki peran penting dalam melaksanakan pendidikan melalui proses pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Salah satu tujuan dilaksanakannya pendidikan adalah untuk membentuk *civic intelligence* siswa. Guru dapat membentuk *civic intelligence* siswa melalui pembelajaran di dalam kelas yang terintegrasi pada mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang dapat menjadi pendorong terbentuknya *civic intelligence* generasi muda adalah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dapat dikatakan bahwa tugas PKn dengan paradigma baru ini adalah mengembangkan pendidikan demokrasi dengan mengemban tiga fungsi pokok, yang pertama adalah mengembangkan kecerdasan warganegara (*civic intelligence*), kedua membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan ketiga mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari Wahab & Sapriya (2011) yang menyatakan bahwa salah satu dari tiga tujuan utama PKn adalah *civic intelligence*.

Pada dasarnya tujuan negara mengembangkan PKn adalah agar setiap warga negaranya menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung

jawab dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Maftuh & Sapriya, 2005). Sehingga, generasi muda yang memiliki kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*) dengan baik menjadi salah satu hal yang dapat membantu menjaga keutuhan suatu negara. Generasi muda inilah yang disebut warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Selain itu, dengan kecerdasan kewargaan yang dimiliki maka secara langsung generasi muda juga akan memiliki keadaban dalam publik.

Keadaban public (*public civility*) merupakan sikap menghargai, menghormati dan peduli dengan orang lain, taat pada aturan dan norma sosial serta menerapkan dan melakukannya dalam hubungan sosial dengan orang lain dan dalam kehidupan publik (masyarakat). Keadaban publik adalah ciri masyarakat yang maju dan terdidik. Bangsa-bangsa yang maju biasanya memiliki keadaban publik yang tinggi, sementara bangsa-bangsa yang terbelakang dan kurang terdidik biasanya memiliki keadaban publik yang rendah. Atas dasar hal tersebut, tulisan ini ingin mengkaji lebih lanjut terkait kajian filosofis dan konseptual Pendidikan Kewarganegaraan abad ke-21 untuk membentuk kecerdasan kewargaan yang berkeadaban publik.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, mengeksplorasi, dan memahami berbagai masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode kepustakaan. Pengumpulan data bersumber dari buku maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan PKn dan kecerdasan kewargaan. Adapun prosedur meta analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, membuat catatan, dan mereview sumber data. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

PKn memiliki hakikat dan peran yang sangat penting dalam menyiapkan warga negara muda yang cerdas, berkarakter dan bertanggungjawab. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mak (2014) "*civic education is an essential element of whole person education because it aims to foster students' positive values and attitudes*". PKn merupakan usaha sadar untuk mengembangkan *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic dispositions* peserta didik guna membentuk warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). PKn menjadi salah satu bidang kajian yang mengemban visi dan misi nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, secara esensi dan kultur PKn agar mampu berkontribusi dalam pencerdasan kehidupan bangsa, salah satu upayanya adalah melalui menumbuh-kembangkan kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*). Secara filosofis orientasi kajian PKn abad ke-21 harus semakin terarah atau diarahkan untuk kecerdasan kewargaan tersebut. Apabila PKn mampu memenuhi dan menjawab tuntutan ini maka melalui PKn akan terbentuk generasi muda yang cerdas, unggul, berkualitas, dan berkeadaban publik (*public civility*).

Kajian ilmiah PKn secara filosofis terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Pertama*, aspek ontologi. Sebagai suatu bidang kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu yang bersifat terapan, PKn memiliki dua dimensi ontologi, yaitu obyek telaah dan obyek pengembangan. Obyek telaah adalah keseluruhan aspek idiil, instrumental, dan praksis PKn yang secara internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran PKn di sekolah dan di luar sekolah, serta format gerakan sosial-kultural kewarganegaraan masyarakat. Sedangkan obyek pengembangan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara yang perlu dikembangkan secara programatik guna mencapai kualitas warga negara yang cerdas dan baik. *Kedua*, aspek epistemologi. Aspek epistemologi PKn secara konseptual-struktural berkaitan erat dengan aspek ontologi PKn, karena memang proses epistemologis pada dasarnya berwujud dalam berbagai bentuk kegiatan sistematis dalam upaya membangun pengetahuan bidang kajian ilmiah PKn yang sudah seharusnya terikat pada obyek telaah dan obyek pengembangan PKn. Sesuai jati diri kajian ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan yang terpusat pada ontologi yang berdimensi obyek telaah, dan obyek pengembangan, maka kegiatan epistemologis Pendidikan Kewarganegaraan mencakup metodologi

penelitian dan metodologi pengembangan. Metodologi penelitian digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, sedangkan metodologi pengembangan digunakan untuk mendapatkan paradigma pedagogis dan rekayasa kurikuler. *Ketiga*, aspek aksiologi. Adapun yang termuat ke dalam aspek aksiologi PKn adalah berbagai manfaat dari hasil penelitian dan pengembangan kajian PKn bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan dan pendidikan kemasyarakatan.

Adapun tujuan PKn baik dalam konteks kajian akademik, kurikuler, maupun sosio-kultural pada prinsipnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Sebagaimana pendapat Hargreaves (1996) bahwa tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu “*active citizens are as political as they are moral, moral sensibility derives in part from political understanding; political apathy spawns moral apathy*”, artinya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter atau dapat disebut juga sebagai pendidikan karakter warga negara yang baik (*good citizen*). Senada dengan Hargreaves, Huang dan Chen (2013) juga mengemukakan bahwa tujuan PKn adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai atau karakter pada peserta didik serta melaksanakan tanggung jawab dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Cogan (1998) juga menambahkan bahwa tujuan dari proses pembelajaran PKn adalah untuk menyiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Pandangan yang komprehensif dijelaskan oleh Somantri (2001) bahwa tujuan PKn adalah untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, berjiwa patriotik, mempunyai rasa toleran tinggi, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis dan berjiwa Pancasila. Dengan demikian, esensi PKn ini diarahkan sebagai pendidikan demokratis untuk membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggungjawab serta sekaligus dalam upaya untuk menjadikan warga yang baik dan demokratis (Somantri, 2001).

Tujuan PKn untuk membentuk warga negara yang sejatinya sejalan dengan esensi *civic intelligence*. *Civic intelligence* adalah kemampuan warga negara untuk memainkan peran dirinya secara proaktif sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam kehidupannya yang berbasis pada identitas normatif bangsa. Sedangkan yang dimaksud dengan warga negara yang baik sebagaimana menurut Murdiono (2018) adalah warga negara yang memiliki berbagai kompetensi sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat tujuh kecakapan yang harus dibangun dalam membentuk kecerdasan kewarganegaraan (Winataputra, 2001), yaitu 1) *civic knowledge*; 2) *civic skill*; 3) *civic disposition*; 4) *civic confidence*; 5) *civic commitment*; 6) *civic competence*; dan 7) *civic culture*. Tujuh kecakapan ini harus terintegrasi secara harmonis dalam aktivitas berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai insan warga negara Indonesia, yang dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*). Ketujuh aspek *civic intelligence* tersebut merupakan satu kesatuan dalam proses kejiwaan seorang warga negara. Sebagai contoh, *civic knowledge* yang berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman akan kedudukan diri sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dengan beberapa kecakapan lainnya. Jika warga negara memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) maka akan terbentuk seorang warga negara yang berkompeten. Kemudian, jika warga negara memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) maka akan menjadi seorang warga negara yang memiliki rasa percaya diri, sedangkan warga negara yang telah memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dengan dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) maka akan terbentuk seorang warga negara yang memiliki komitmen kuat. Selanjutnya, warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dengan dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) maka akan menjadi seorang warga negara yang berpengetahuan, terampil, dan berkepribadian/berkarakter. Inilah esensi dari Pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian filosofis keilmuan melalui koridor “*value-based education*” dalam membentuk warga negara yang cerdas, berkualitas, unggul, terampil dan berdaya saing, serta berkarakter (*good citizen*).

## Simpulan

Menghadapi abad ke-21 yang penuh dengan perubahan dan tuntutan mengharuskan PKn menguatkan perannya dalam membentuk kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*) yang berkeadaban

publik. Warga negara yang memiliki *civic intelligence* akan mampu memainkan perannya secara proaktif dan efektif sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hal ini dapat terjadi karena warga negara yang memiliki *civic intelligence* berarti kompeten dalam mengembang tugas kewargaan, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan aktif terlibat dalam urusan publik. Oleh karenanya, arah filosofis, tujuan, dan kultur Pendidikan Kewarganegaraan abad ke-21 harus sejalan atau diorientasikan untuk menumbuh-kembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) melalui koridor “*value-based education*” demi terciptanya generasi muda yang cerdas, berkualitas, unggul dan berdaya saing, serta berkarakter (berkeadaban publik). Selanjutnya, dalam upaya menumbuh-kembangkan kecerdasan kewarganegaraan tersebut terdapat tujuh kecakapan yang harus dibangun, yaitu (1) *civic knowledge*; (2) *civic skill*; (3) *civic disposition*; (4) *civic confidence*; (5) *civic commitment*; (6) *civic competence*; dan (7) *civic culture*.

## Referensi

- Badan Nasional Standar Pendidikan. (2010). *Paradigma pendidikan nasional abad XXI*. Badan Standar Nasional Pendidikan Versi 1.0. Retrieved Desember 10, 2021, from [http://www.bsnpindonesia.org/id/wpcontent/Laporan BNSP2010.pdf](http://www.bsnpindonesia.org/id/wpcontent/Laporan_BNSP2010.pdf).
- Cogan, J. J. (1998). Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context. In J.J. Cogan & R. Derricott (Eds.), *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education (hal. 1–20)*: Kogan Page.
- Hargreaves, D.H. (1996). *Teaching as a research based profession: possibilities and prospects*. Teacher Training Agency.
- Huang, Tien-Chi & Chen, Chia-Chen. (2013). Animaning civic education: developing a knowledge navigation system using blogging and topic map technology. *Educational Technology & Society*, 16, 79-92.
- Maftuh., & Sapriya. (2005). Pembelajaran PKn melalui konsep. *Jurnal Civicus*, 1(5), 319-321.
- Maghfiroh, L. (2017). Membangun karakter siswa dan meningkatkan kecerdasan spiritual melalui the hidden curriculum di MI Wahid Hasyim Yogyakarta. *DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 4(2), 208-225.
- Mak, S.W. (2014). Evaluation of a moral and character education group for primary school students. *Discovery – SS Student E-Journal*, 4(3), 142-164.
- Mardhiyah, R.H., Aldriani, S. N. F., Chitta, F., Zulfikar, M. F. (2021). Pentingnya keterampilan belajar di abad 21 sebagai tuntutan dalam pengembangan sumber daya manusia. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(1), 29-40.
- Masrukhi. (2018). Pengembangan civic intelligence berbasis kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar. *Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018*. FKIP UNS.
- Murdiono, M. (2018). *Pendidikan kewarganegaraan global: Membangun kompetensi global warga negara muda*. UNY Press.
- Redhan, I.W. (2019). Mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran kimia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, 13(1), 2239-2253.
- Soh, T., Arsad, N., & Osman, K. (2010). The relationship of 21st century skills on student’s attitude and perception towards physics. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 7(C), 546–554.
- Somantri, M.N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Kerjasama Program Pascasarjana dan FPIPS UPI dengan PT Remaja Rosdakarya.
- Wahab, A.A., & Sapriya (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.

Winataputra, U.S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan*. Disertasi: Sekolah Pascasarjana UPI.